

PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
(Study Kasus Di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar)

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat
Sarjana S-1
Pendidikan Kewarganegaraan



Oleh:

Diah Eko Riatun
A220080042

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012

PERSETUJUAN

PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
(Study Kasus Di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar)

Diajukan oleh:

DIAH EKO RIATUN
A220080042

Telah Disetujui untuk Dipertahakan di Depan Penguji
Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Dra. Hj. Sri Gunasi, SH. MH
NIK. 202

Tanggal: 6 Oktober 2012

Pembimbing II



Dra. Hj. Sri Arfiah, SH. M. Pd
NIK. 235

Tanggal: 6 Oktober 2012

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama : DIAH EKO RIATUN
NIM : A220080042
Jenis : SKRIPSI
Judul : **PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (Study Kasus
Di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar).**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas *royalty* kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikanya, serta menampilkannya dalam bentuk *soft copy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap memantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

St

2012



PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN

(Study Kasus Di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karangnyar)

Diah Eko Riatun. A220080042, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn),
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012 +
44 halaman.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berada di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari beberapa informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Informan yang dipilih dalam penelitian ini, meliputi : Kepala Desa, petani dan buruh tani di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian bagi hasil tanah pertanian diantaranya adalah kesepakatan antara pemilik tanah pertanian dan penggarap. Pembagian hasil tanah pertanian menggunakan istilah *mertelu*, yaitu 25% untuk pemilik ladang dan 75% untuk penggarap ladang. Karena dari bibit, obat, buruh dan lain-lain dari penggarap sedangkan pemilik hanya menyediakan ladangnya saja untuk dikelola oleh penggarap. Sistem perjanjian ini lebih dekat dengan adat yang berlaku di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, karena dianggap lebih fleksibel dan lebih sederhana. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sekarang dengan menggunakan sistem *mertelu* ini kesejahteraan masyarakat di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ini menjadi lebih baik dan sejahtera.

Kata kunci, Perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Penulis

Diah Eko Riatun

Pendahuluan

Pertanian adalah salah satu wujud dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional pada dasarnya berorientasi dengan kemajuan dalam segala aspek kehidupan yang terdapat di kehidupan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Para petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk mengolah berbagai macam tanaman yang menjadi bahan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Dalam penerapannya pengolahan sawah biasanya terjadi semacam perjanjian tentang bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap sebagai buruh tani.

Secara geografis desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 10 (sepuluh) desa di kecamatan Tawangmangu yang mempunyai jarak 23 Km dari kota kabupaten, 0,5 Km dari Kecamatan Tawangmangu. Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Secara geografis desa Kalisoro berbatasan Timur dengan Kelurahan Blumbang, sebelah selatan dengan Kecamatan Jatiyoso, sebelah utara dengan Desa Tengkluk, sebelah barat dengan Kelurahan Tawangmangu. Luas Wilayah administratif 1.057.615 Ha. Desa Tawangmangu letak topografis dataran tinggi.

Kebijakan pertanian dalam Peraturan Perundang-undangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). Di lihat dari isi, konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangatlah bersifat merakyat. Karena kebijakan pelaksanaan UUPA dipusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama bagi golongan petani yang merupakan bagian terbesar dari corak kehidupan rakyat Indonesia. Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu *landreform* atau agraria *reform*. Jaya (1989: 19) memberikan pengertian *landreform* yaitu: Kata *land* yang berarti tanah dan *reform* yang berarti perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk atau membangun atau menata kembali struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian lama menuju struktur pertanian baru.

Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa “Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian haruslah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam UUPA.

Perjanjian bagi hasil ini merupakan suatu kerjasama dengan kesepakatan antara dua pihak yang saling suka dan tidak ada unsur paksaan. Untuk mencapai suatu kesepakatan bagi hasil ini ditempuh dengan jalan musyawarah. Proses musyawarah juga ditentukan secara tegas yaitu dilakukan secara langsung antara pemilik tanah dan penggarap tanah, dengan dipimpin oleh ketua panitia pengadaan tanah. Pemilik tanah harus memiliki kepercayaan kepada penggarap tanah demi kelancaran kerjasama tersebut. Selain memiliki rasa percaya, juga harus memiliki rasa toleransi diantara keduanya. Memang toleransi tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya dalam suatu pekerjaan. Dengan adanya landasan toleransi dan saling percaya akan memperlancar kelangsungan kerjasama dalam perjanjian bagi hasil ini. Perjanjian bagi hasil ini merupakan suatu kerjasama dengan kesepakatan antara dua pihak yang saling suka dan tidak ada unsur paksaan. Untuk mencapai suatu kesepakatan bagi hasil ini ditempuh dengan jalan musyawarah. Proses musyawarah juga ditentukan secara tegas yaitu dilakukan secara langsung antara pemilik tanah dan penggarap tanah, dengan dipimpin oleh ketua panitia pengadaan tanah.

Disini penulis mencoba untuk membahas masalah bagi hasil yang mana banyak masyarakat pedesaan melakukannya sebagai mata pencaharian. Peranan yang sangat penting dalam penggarapan sawah, seperti: tanah, air dan cuaca merupakan faktor alam yang menyebabkan adanya perbedaan perjanjian kerja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan perjanjian bagi hasil yang ditinjau secara yuridis sebagai penelitian dengan judul: “PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (Study Kasus Di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”.

Landasan teori

Mengkaji Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada dasarnya bukanlah persoalan yang sederhana. Untuk itu diperlukan pemaparan yang lebih mendalam tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

a. *Pengertian perjanjian.* Menurut Satrio (1992:23), pengertian perjanjian yaitu:

Menurut Subekti (1979:1), "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal." Dalam hal ini perjanjian menyangkut tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap.

b. *Syarat Sah Suatu Perjanjian.* Menurut Subekti (1979:17), dalam suatu perjanjian harus memperhatikan empat hal agar suatu perjanjian dinyatakan sah. Keempat hal tersebut antara lain:

1) Sepakat dalam mengikatkan diri berarti dalam suatu perjanjian harus ada sesuatu yang mengikat. Dalam suatu perjanjian, perikatan dalam perjanjian haruslah terdapat suatu kesepakatan bersama. 2) Cakap dalam membuat perjanjian berarti dalam suatu perjanjian haruslah benar-benar paham atau mengerti mengenai hal perjanjian. Maka suatu perjanjian harus disertai dengan kecakapan dalam membuat perjanjian agar apa yang disepakati dalam perjanjian dapat terlaksana dengan baik. 3) Suatu perjanjian haruslah mengenai hal tertentu. Maksudnya bahwa dalam perjanjian pasti menyangkut hal tertentu dalam pelaksanaannya. Termasuk hal tersebut adalah perjanjian bagi hasil. 4) Suatu perjanjian harus didasari atas sesuatu sebab yang halal. Supaya dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan. Sebab yang halal berarti suatu

perjanjian harus didasarkan pada sesuatu hal yang halal dan tidak berupa sesuatu yang haram atau dilarang.

c. *Pengertian bagi hasil*. Muhammad (2004:18) menyebutkan bahwa:

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.

d. *Pengertian Perjanjian Bagi Hasil*. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 huruf c, dikatakan bahwa:

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

e. *Macam-macam Perjanjian Bagi Hasil*. Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian biasanya disebut dengan beberapa istilah yang berbeda. Di beberapa daerah tentunya memiliki nama dan istilah yang berbeda-beda. Sudiyat (2000:37), menyebutkan istilah bagi hasil tanah pertanian di beberapa daerah antara lain:

- 1) *Memperduai* untuk istilah daerah Minangkabau.
- 2) *Toyo* untuk istilah daerah Minahasa.
- 3) *Tesang* untuk istilah daerah Sulawesi Selatan.
- 4) *Srama, Mesi, Maro* (1:1) dan *Mertelu* (1:2) untuk daerah Jawa Tengah.
- 5) *Nengah* (1:1) dan *Jejuron* untuk daerah Priangan, Jawa Barat.

f. *Pengertian Tanah*. Menurut Darmawijaya (1997:4),

“Tanah adalah medium alam bagi tumbuhnya vegetasi yang terdapat di permukaan bumi atau bentuk organik dan anorganik yang ditumbuhi tumbuhan baik tetap maupun sementara”.

g. Pengertian Tanah Pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1140) pertanian ialah “segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-tanaman (penguasaan tanah)”. Menurut Perangin (1986:125-126), tanah pertanian adalah:

Semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah yang luas berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian. Termasuk tanah pertanian ialah semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.

Metode penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metode interaktif. Dalam penerapannya metode interaktif menitik beratkan pada hal yang bersifat deskriptif. Menurut Aminuddin (1990:16), penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskripsi fenomena, tidak berupa angka-angka/ koefisien hubungan antara variabel.

Tempat atau lokasi yaitu di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar sedangkan peristiwa yang dimaksud adalah mengenai Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Subjek penelitian ini adalah Ibu Narti sebagai petani / pengarap ladang pertanian dan Bapak Tarno sebagai pemilik tanah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu objek penelitian adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Sesuai dengan karakteristik penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu meliputi:

1. Metode Wawancara

Menurut Nawawi dan Martini (1992:98), pengertian wawancara sebagai berikut:

Interview (wawancara) adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi tersebut yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi (*interviewer* atau *information*) yang dijawab secara lisan pula oleh responden (*interview*).

2. Metode observasi partisipatif

Sugiyono (2009:65), menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka”. Dengan metode observasi penulis mengamati pelaksanaan penggarapan sawah namun tidak terlibat langsung dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2009:82), menyatakan bahwa pengertian dokumen adalah sebagai berikut:

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan kebijakan dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar, hidup, sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui dokumen yang ada dan tersimpan di lokasi tempat Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Pembahasan

Sistem perjanjian bagi hasil di Desa kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada umumnya menggunakan sistem *mertelu* atau pembagian hasil dengan perbandingan pembagian 25:75. Semua modal sudah ditanggungkan pada penggarap. Ada pula $\frac{2}{3}$ untuk pemilik modal dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap jika pemilik ikut memberikan modal berupa pemberian pupuk dan benih atau disebut *mertelu*. Namun, jenis perjanjian dengan pembagian $\frac{2}{3}$ bagi pemilik dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap sudah tidak berlaku lagi di Desa Kalisoro. Pemilik biasanya menawarkan tanahnya untuk digarap oleh para buruh tani karena kesibukannya yang tidak dapat menggarap tanahnya atau karena tidak punya kemampuan untuk mengerjakan tanahnya.

Adapun fungsi bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar itu sendiri yaitu, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil. Serta untuk memudahkan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap perjanjian bagi hasil yang merugikan kedua belah pihak antara petani dan penggarap. Serta untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai bagi hasil tersebut.

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dengan lokasi di desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memakai sistem *mertelu* atau pembagian hasil 25% untuk pemilik dan 75% untuk penggarap. Adapun penggunaan *maro* 50:50 untuk pemilik dan penggarap sudah tidak berlaku lagi karena pemilik pada umumnya enggan untuk memberikan modal untuk penggarapan tanahnya.
2. Perjanjian bagi hasil pertanian di desa Kalisoro, Keecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memiliki 2 (dua) macam bentuk perjanjian yaitu:
 - a. Kontrak musiman adalah suatu perjanjian dengan jangka waktu musiman. Dalam satu musim bisa dilakukan beberapa kali panen.
 - b. Kontrak tahunan adalah suatu perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu tahunan. Dalam proses penggarapannya dilakukan berdasarkan beberapa tahun tanah digarap oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan awal.
3. Pembagian hasil tanah pertanian dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. Biasanya menggunakan model *mertelu* dengan ketentuan 25% untuk pemilik dan 75% untuk penggarap. Semua biaya dal proses penggarapan dibebankan kepada penggarap. Hasil pertanian diberikan pada saat panen tiba.
4. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten karanganyar lebih dekat pada adat yang berlaku disekitarnya. Jadi banyak pemilik dan penggarap yang tidak mengetahui dan memahami adanya ketentuan

dalam UU No. 2 Tahun 1960. Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro sampai saat ini masih berpegang pada adat kebiasaan setempat.

Berdasarkan penelitian mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, maka disarankan hal sebagai berikut:

1. Terhadap pemilik tanah

a. Seorang pemilik tanah adalah orang yang memiliki kekuasaan atas tanahnya, oleh karenanya seorang pemilik harus bijak dalam menentukan besarnya tanah yang digarap oleh penggarap.

b. UU No 2 Tahun 1960 adalah undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil, maka bagi para pemilik diharuskan memahami isi dari undang-undang tersebut.

c. Perjanjian bagi hasil harus didukung oleh adat istiadat setempat.

2. Terhadap penggarap

a. Seorang penggarap harus mengikuti apa yang disyaratkan oleh pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil, karena pemilik memiliki kekuasaan atas tanah miliknya walaupun perjanjian itu sepertinya bersifat memihak.

b. UU No,2 Tahun 1960 memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban penggarap, maka perlu adanya pemahaman bagi para penggarap mengenai undang-undang tersebut.

c. Apabila terjadi gagal panen kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap tanah dan tidak hanya dibebankan kepada penggarap saja.

3. Terhadap masyarakat umum

a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian perlu dipahami dan diketahui oleh masyarakat umum sehingga tambahan pengetahuan dalam bidang pertanian.

b. Sebiknya masyarakat pada umumnya juga memahami mengenai UU No. 2 Tahun 1960 sebagai dasar bila tidak menjadi bagian dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

4. Terhadap pemerintah daerah setempat

Hendaknya pemerintah daerah setempat mengetahui perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakatnya. Hal ini agar bila terjadi suatu persengketaan pemerintah setempat bisa ikut menyelesaikan permasalahan tersebut.

5. Terhadap peneliti berikutnya

Peneliti yang sejenis hendaknya dilakukan dengan metode tertentu dan cakupan yang lebih mendetail mengenai hal yang akan diteliti. Pada penelitian berikutnya hendaknya diperlukan sebuah penelitian yang lebih mendalam, sehingga akan memberikan masukan yang lebih luas kepada masyarakat umum dan bagi para petani pada khususnya.

Daftar Pustaka

- Aminuddin. 1990. *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa dan Sastra*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh Malang (YA 3 Malang).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awalludin, Azmi. 2010. *Bagi Hasil Tanah Pertanian Kaitannya dengan UU No. 2 Tahun 1960*. Skripsi S-1. Surakarta: FKIP UMS.
- Darmawijaya, Isa. 1997. *Klasifikasi Tanah Dasar Teori Bagi Peneliti Tanah dan Pelaksanaan Pertanian di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Erviana. 2005. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum UNDIP.
- Hadikusumo, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- [Http: //organisasi.org/ jenis-macam-tanah-di-indonesia-humus-gambut-vulkanik-laterit-aluvial-pasir-dll](http://organisasi.org/jenis-macam-tanah-di-indonesia-humus-gambut-vulkanik-laterit-aluvial-pasir-dll).
- Iko, Hidup. 2008. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum UNDIP.
- Jaya, I Nyoman Budi. 1989. *Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP (Universitas Indonesia Press).
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Perangin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Perangin, Effendi. 1987. *Praktek Penggunaan Kredit sebagai Jaminan Kredit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, Wantjik. 1982. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: IPT Citra Aditya Bakti.
- Siswanto. 2005. *Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudiyat, Imam. 2000. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- TIM Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.